

# Membaca Kasus 1965

OLEH HENDRA KURNIAWAN, MPD



Pelajaran sejarah semestinya tidak sekadar mengajarkan peristiwa, namun juga makna di baliknya. Untuk itu butuh paradigma baru dalam memandang peristiwa-peristiwa sejarah yang kontroversial. Padahal selama ini sejarah yang diajarkan di sekolah merupakan versi resmi pemerintah melalui rumusan kurikulum. Sumber belajar sejarah masih bertolak dari buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) maupun buku-buku lain yang lulus sensor. Pembelajaran sejarah yang tidak sesuai dengan pakem resmi pemerintah dianggap berbahaya dan mengancam keutuhan bangsa.

Sejarah memang memegang peran vital pembentukan pemahaman dan kesadaran generasi muda. Pemikiran ini bukannya keliru. Hanya, tidak seluruh catatan sejarah bangsa bebas dari kepentingan politik. Salah satunya yang paling kontroversial mengenai peristiwa 1965. Asvi Warman Adam (2007) mengungkapkan, sebetulnya tidak ada interpretasi yang sifatnya terakhir dan tunggal. Tak heran kemudian mencuat berbagai versi dan pendapat.

Selama ini monopoli sejarah peristiwa 1965 telah mengekang kebebasan berpikir dan berpendapat. Ini justru berbahaya karena dapat menyebabkan pemahaman melenceng. Komunisme memang merupakan bahaya laten yang patut diwaspadai. Akan tetapi di sisi lain bangsa perlu membuka diri terhadap berbagai perkembangan wacana baru kasus tersebut

yang juga memerlukan ruang ilmiah. Bukan justru memenjarakan pikiran kritis pada *common sense* yang dianggap paling tepat.

Sensitivitas sejarah dalam rentang tahun 1965 ini juga berimbas pada pembelajaran di sekolah. Penambalan sejarah sebagai alat doktrinasi penguasa menjadikan pembelajaran di sekolah lebih menekankan pada peran militer dan kepentingan politik, bukan kebenaran ilmiah. Hingga kini pembelajaran sejarah sekolah masih berdasar tafsir Orde Baru (Orba), meski sudah runtuh dan kurikulum telah silih berganti.

Penyajian materi se-ja-

rah dalam pembelajaran di sekolah bukan barang sepele. Berbagai informasi mengenai peristiwa 1965, misalnya, mesti dapat diakses dengan mudah. Memang untuk membuka katup penyumbat kebebasan berpikir kritis dan ilmiah seputar peristiwa ini yang berpuh-puluh tahun tidak pernah

Guru harus mampu menyajikan materi yang netral dan tidak menggiring peserta didik untuk condong pada salah satu versi. Sementara, implementasi Kurikulum 2013 juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis murid, termasuk dalam memaknai peristiwa sejarah.

Pendekatan dalam peman-

*not forgotten*. Maka butuh tindakan korektif dengan mengubah paradigma pembelajaran sejarah yang selama ini sarat kepentingan politik.

Guru perlu mengambil jarak dengan kontroversi untuk mencari akar permasalahan serta solusi bijak bagi kehidupan bangsa. Selain itu, jauh lebih penting menanamkan kesadaran sejarah guna mencetak generasi arif dalam menghadapi persoalan.

Francois Caron mengungkapkan, tatkala sejarah menyadarkan bangsa tentang perbedaan-perbedaan, sebetulnya telah mengajarkan toleransi dan kebebasan. Masyarakat yang sehat akan bisa menerima perbedaan dan menolak sikap-sikap intoleran. Maka jika ada yang masih sulit menerima perbedaan terhadap suatu peristiwa sejarah, apalagi untuk sesuatu yang kontroversial, perlu merenung mendalam.

Sejarah merupakan ilmu mengenai masyarakat, bukan hanya menjadi alat penguasa. Sejarah jangan sampai terseret arus politik dan menjadi alat kekuasaan. Ignas Kleden menyatakan, pendidikan mereproduksi suasana umum (salah satunya) dalam politik, sekalipun diharapkan juga koreksi suasana umum yang tak dikehendaki. Untuk itulah pelajaran sejarah sekolah perlu menyajikan berbagai wacana dan membuka ruang-ruang berpikir kritis sebagai kasus kontroversi.

## Kelam

Patut disadari bahwa peristiwa 1965 menjadi retentat sejarah kelam bangsa karena diduga terjadi pembantaian massal masyarakat sipil yang dianggap PKI dan simpatisan. Ini menjadi tragedi kemanusiaan besar. Presiden Joko Widodo dalam konsep revolusi mentalnya menegaskan bahwa sistem pendidikan harus diarahkan untuk membangun identitas bangsa yang berbudaya dan beradab.

Maka memahami sisi yang satu ini bertujuan agar peserta didik memiliki perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan sehingga tragedi serupa tidak terulang. Pembelajaran sejarah bukan untuk menebar kebencian dan menanam dendam dari masa lalu. Wacana rekonsiliasi nasional yang sering dibicarakan menjadi poin penting. Konteksnya *forgiven but*

« Pendekatan dalam pemanfaatan materi belajar sejarah berdasar keilmuan (saintifik) dan politis. Keduanya jangan ditempatkan pada hubungan dikotomis. Pendekatan politis dapat dilakukan sepanjang tidak menghilangkan daya kritis siswa. Namun absolutisme kebenaran sejarah juga harus dihindari. Pendekatan politis dapat ditekankan pada upaya membangun watak bangsa. Sementara, pendekatan saintifik berperan penting dalam membangun daya nalar. Jadi kedua pendekatan harus sejalan.



bergeser sedikit pun, tidak mudah.

Penulis dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

## PERADA

Centre sebagai Alternatif Kritik Sosial